Indonesian Research Journal on Education

e-ISSN: 2775 – 8672, p-ISSN: 2775 – 9482
Volume 4, Nomor 4 Tahun 2024
Halaman: 22 - 29

Web: https://irje.org/index.php/irje

RESEARCH

Evaluasi Program Bantuan Keuangan Khusus Bagi SMK Kabupaten Sijunjung

Addurorul Muntatsiroh[1], Adripen[2], M. Yusuf Salam[3], Muhammad Faziz[4], Ardimen[5]
Manajemen Pendidikan Islam, Program Pascasarjana, Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar, Indonesia

addurorulmuntat85@gmail.com

Kata Kunci:
Bantuan Keuangan Khusus (BKK), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Evaluasi Program, Model CIPP, Kualitas Pendidikan

Abstrak

Penelitian ini mengevaluasi program Bantuan Keuangan Khusus (BKK) yang diberikan kepada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat, dengan menggunakan model evaluasi CIPP (Context, Input, Process, Product). Tujuan dari evaluasi ini adalah untuk menilai efektivitas program dalam meningkatkan kualitas pendidikan di SMK. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa komponen proses dan produk memperoleh skor yang baik (80%), menandakan bahwa program berjalan sesuai dengan prosedur dan menghasilkan dampak positif. Namun, komponen context dan input hanya mencapai kategori cukup (59% dan 60%), menunjukkan adanya kekurangan dalam pemenuhan kebutuhan dasar dan alokasi sumber daya. Evaluasi ini merekomendasikan peningkatan dalam perencanaan dan pengelolaan dana, serta perbaikan dalam sosialisasi dan fleksibilitas penggunaan dana. Secara keseluruhan, program BKK menunjukkan potensi yang baik untuk meningkatkan layanan pendidikan, tetapi memerlukan perbaikan untuk mencapai hasil yang lebih optimal.

Key Word:
Special Financial Assistance (BKK), Vocational High Schools (SMK), Program Evaluation, CIPP Model, Educational Quality

Abstract

This study evaluates the Special Financial Assistance (BKK) program provided to Vocational High Schools (SMK) in Sijunjung Regency, West Sumatra Province, using the CIPP (Context, Input, Process, Product) evaluation model. The aim of this evaluation is to assess the program's effectiveness in enhancing the quality of education in SMK. The evaluation results indicate that the process and product components received good scores (80%), suggesting that the program is operating according to procedures and producing positive impacts. However, the context and input components only reached the sufficient category (59% and 60%), highlighting deficiencies in meeting basic needs and resource allocation. The evaluation recommends improvements in planning and fund management, as well as enhancements in socialization and flexibility in fund usage. Overall, the BKK program shows good potential for improving educational services but requires adjustments to achieve more optimal results.

Copyright © 2024 Addurorul Muntatsiroh, Adripen, M. Yusuf Salam, Muhammad Faziz, Ardimen
*This work is licensed under a **Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)***

PENDAHULUAN

Pendidikan adalah salah satu fondasi utama dalam pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas. Pemerintah Indonesia telah menaruh perhatian besar pada penyediaan akses pendidikan yang merata dan berkualitas bagi seluruh rakyatnya. Langkah-langkah nyata dalam mencapai tujuan ini salah satunya diwujudkan melalui berbagai bentuk pendanaan pendidikan. Sejak diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, penyelenggaraan pendidikan telah diklasifikasikan secara jelas berdasarkan jenis penyelenggaranya, yaitu oleh pemerintah dan masyarakat. Untuk mendukung operasional sekolah, pemerintah pusat memperkenalkan program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang telah berjalan sejak tahun 2005. Selain BOS, berbagai bentuk bantuan keuangan lainnya juga diberikan oleh pemerintah daerah untuk mendukung sektor pendidikan di tingkat lokal, salah satunya adalah Bantuan Keuangan Khusus (BKK).

BKK dalam bidang pendidikan merupakan salah satu bentuk dukungan pemerintah daerah yang diberikan kepada institusi pendidikan untuk memperluas akses dan meningkatkan kualitas pendidikan. Dasar hukumnya diatur dalam peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah serta Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Konsekuensi dari undang-undang ini adalah pemerintah daerah memiliki kewenangan lebih besar dalam mengatur bidang pendidikan di wilayahnya masing-masing (Mulyasa, 2014). BKK ini telah diterapkan di berbagai daerah di Indonesia, termasuk di Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat, yang

e-ISSN: 2775 – 8672
p-ISSN: 2775 – 9482

telah memulai program ini sejak tahun 2022 sesuai dengan Peraturan Bupati Sijunjung Nomor 23 Tahun 2021.

Salah satu tujuan dari program BKK di Kabupaten Sijunjung adalah untuk mendukung operasional dan pengembangan pendidikan di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Dalam implementasinya, bantuan ini diberikan berdasarkan jumlah siswa yang terdaftar di setiap sekolah. Adapun penerima BKK ini adalah delapan SMK berstatus negeri yang tersebar di seluruh Kabupaten Sijunjung. Total bantuan yang diberikan sebesar Rp50.000 per siswa per bulan atau Rp600.000 per tahun, yang penggunaannya disesuaikan dengan kebutuhan operasional sekolah seperti yang diatur dalam Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah (RKAS).

Data tiga tahun terakhir menunjukkan adanya peningkatan jumlah siswa di SMK Negeri Kabupaten Sijunjung, yang dapat diindikasikan sebagai salah satu dampak dari implementasi program BKK. Misalnya, pada tahun 2021 jumlah siswa SMK di Kabupaten Sijunjung tercatat sebanyak 3.729 siswa, meningkat menjadi 3.800 siswa pada tahun 2022, dan kemudian menjadi 3.897 siswa pada tahun 2023. Namun, peningkatan ini belum dapat dijadikan bukti kuat akan keberhasilan program BKK tanpa adanya evaluasi menyeluruh yang mampu menjelaskan hubungan antara pemberian bantuan dan pencapaian tujuan program.

Evaluasi adalah proses penting yang harus dilakukan untuk mengetahui sejauh mana program tersebut mencapai tujuannya. Dalam konteks evaluasi kebijakan publik, Abdul Wahab (1990) mengemukakan bahwa kegagalan kebijakan dapat terjadi karena dua hal, yaitu "non-implementation" atau tidak terlaksananya kebijakan sesuai rencana, dan "unsuccessful implementation" atau implementasi yang tidak berhasil. Oleh karena itu, evaluasi diperlukan agar kebijakan yang diterapkan dapat terus disesuaikan untuk mencapai tujuan yang diinginkan (Asmendri, 2018; Stufflebeam & Shinkfield, 1987).

Dalam Islam, konsep evaluasi atau "ar-riqabah" juga memiliki makna penting, yakni sebagai cara untuk memastikan bahwa aktivitas manusia dijalankan sesuai dengan perencanaan dan hukum Allah. Evaluasi ini mencakup aspek spiritual dan manajerial, di mana setiap kegiatan harus dapat diukur, dinilai, dan dibandingkan dengan standar yang telah ditetapkan. Al-Quran mengajarkan tentang pentingnya evaluasi dalam beberapa ayat, seperti dalam surat Al-Infithar ayat 10-12, dan surat Al-Hasyr ayat 18 yang menekankan pentingnya setiap individu dan kelompok untuk melihat kembali apa yang telah mereka kerjakan dan memperbaiki tindakan mereka ke depan. Prinsip ini relevan dalam konteks evaluasi program publik, termasuk dalam bidang pendidikan.

Evaluasi dalam manajemen pendidikan, terutama dalam konteks Islam, seperti yang dijelaskan oleh Hidayat (2017) dan Hasanah (2020), mencakup dua kegiatan utama: penilaian dan pengukuran. Evaluasi bertujuan untuk mendapatkan umpan balik yang akurat terkait pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Ini sesuai dengan pengertian evaluasi menurut UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, di mana evaluasi diperlukan untuk pengendalian mutu pendidikan di Indonesia.

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi program BKK yang diberikan kepada SMK di Kabupaten Sijunjung. Menggunakan model evaluasi CIPP (Context, Input, Process, Product) yang dikembangkan oleh Stufflebeam (1971), penelitian ini akan menganalisis empat aspek utama dari implementasi program BKK: konteks (relevansi dan kebutuhan program), input (sumber daya dan strategi yang digunakan), proses (pelaksanaan program), dan produk (hasil yang dicapai). Dengan mengevaluasi program ini secara menyeluruh, diharapkan dapat ditemukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan program, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan ke depan.

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam pengembangan kebijakan pendidikan di Kabupaten Sijunjung, serta memperkuat argumen tentang pentingnya evaluasi dalam setiap program pemerintah. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih baik tentang efektivitas BKK dalam meningkatkan kualitas pendidikan di tingkat SMK, serta memberikan informasi yang relevan bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan strategi yang lebih baik ke depannya.

METODE

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan evaluasi (evaluation research) dengan metode deskriptif kuantitatif. Penelitian evaluasi digunakan untuk mengukur dampak suatu program dengan membandingkan hasil yang dicapai dengan tujuan yang telah ditetapkan (Mulyono, 2009). Penelitian ini mengevaluasi pelaksanaan bantuan keuangan khusus di SMK Negeri Kabupaten Sijunjung melalui model CIPP (Context, Input, Process, Product). Desain ini mengarahkan peneliti dalam mengumpulkan dan menganalisis data secara sistematis untuk menentukan manfaat dan efektivitas program (Nana Saodih, 2009; Sukmadinata, 2010). Teknik pengumpulan data meliputi angket dengan skala Likert dan dokumentasi yang relevan, sementara data dianalisis secara deskriptif menggunakan persentase (Sugiyono, 2015).

e-ISSN: 2775 – 8672
p-ISSN: 2775 – 9482

Populasi penelitian ini adalah seluruh SMK Negeri di Kabupaten Sijunjung yang melibatkan kepala sekolah, guru, dan tenaga kependidikan dengan jumlah total 321 orang. Sampel diambil menggunakan teknik random sampling, sehingga semua anggota populasi memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih (Priadana, 2021; Zuriah, 2006). Menurut Suharsimi Arikunto (2010), jika subjek lebih dari 100 orang, maka 10%-25% dari total populasi diambil sebagai sampel. Berdasarkan perhitungan ini, sampel dipilih secara acak untuk memastikan representativitas dalam hasil penelitian.

Validitas instrumen diuji menggunakan korelasi Bivariate Pearson melalui SPSS, dengan item dianggap valid jika memiliki korelasi signifikan terhadap skor total (Zulganef, 2006). Analisis data dilakukan secara deskriptif dengan menghitung persentase dari skor yang diperoleh dibandingkan dengan skor maksimal (Dicki Hartananto, 2019). Hasil penelitian disajikan dalam bentuk tabel dan grafik, dan kesimpulan diambil berdasarkan pencapaian program di aspek konteks, input, proses, dan produk sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan.

HASIL DAN PEMBHASAN

Evaluasi *Context* Bantuan Keuangan Khusus bagi SMK Kabupaten Sijunjung

Evaluasi *context* bantuan keuangan khusus bagi SMK Kabupaten Sijunjung berfokus pada pemahaman latar belakang serta konteks program yang diimplementasikan. Menurut Peraturan Bupati Sijunjung Nomor 23 Tahun 2021, pemberian bantuan keuangan khusus bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan di SMK, dengan harapan dapat memperluas akses pendidikan dan meningkatkan angka partisipasi sekolah, sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sijunjung tahun 2021-2026.

Penerapan bantuan ini didukung dengan berbagai peraturan pendukung, termasuk Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2021, petunjuk teknis pengelolaan bantuan, serta Surat Perjanjian Kerja antara pemerintah daerah dan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat. Selain itu, terdapat standar operasional prosedur pengelolaan keuangan dan standar harga yang mengikuti ketentuan dari Peraturan Gubernur. Data dari Cabang Dinas Pendidikan Wilayah V Provinsi Sumatera Barat menunjukkan adanya kenaikan jumlah siswa SMK di Kabupaten Sijunjung selama tiga tahun terakhir, mengindikasikan bahwa bantuan ini membantu memperluas akses pendidikan.

Tabel 1. Data siswa SMK se-Kabupaten Sijunjung

No	Nama SMK	2021	2022	2023
1	SMKN 1 Sijunjung	1157	1123	1209
2	SMKN 2 Sijunjung	745	760	789
3	SMKN 3 Sijunjung	518	523	557
4	SMKN 4 Sijunjung	455	448	488
5	SMKN 5 Sijunjung	418	424	418
6	SMKN 6 Sijunjung	75	87	79
7	SMKN 7 Sijunjung	256	274	264
8	SMKN 8 Sijunjung	105	161	93
	Total	3729	3800	3897

Sumber: Cabang Dinas Pendidikan Wilayah V Provinsi Sumatera Barat.

Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa skor evaluasi *context* dari bantuan keuangan khusus hanya mencapai 59, yang tergolong dalam kategori "Cukup" (berdasarkan tabel kriteria keberhasilan). Hal ini menunjukkan bahwa program bantuan masih belum optimal dalam memenuhi kebutuhan mendesak SMK, terutama terkait perbaikan dan pemeliharaan sarana prasarana dengan kategori sedang dan berat. Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) hanya mencakup pemeliharaan ringan, sedangkan pemeliharaan berat masih mengandalkan dana alokasi khusus (DAK) atau partisipasi komite sekolah, yang tidak selalu tersedia untuk semua sekolah. Harapannya, bantuan keuangan khusus dapat mengatasi kebutuhan-kebutuhan mendesak tersebut, termasuk pembaruan peralatan praktik yang sudah ketinggalan zaman.

Tabel 2. Hasil Evaluasi Bantuan Keuangan Khusus Bagi SMK Kabupaten Sijunjung pada Komponen Context

Skor Perolehan	Skor Maksimal	Hasil	Kategori
1883	3200	59	Cukup

Evaluasi *context* yang meliputi tujuan dan manfaat program menunjukkan perlunya peningkatan kualitas. Menurut Supriadi (2002 dalam Supriadi, 2004:182), biaya operasional SMK relatif lebih besar dibandingkan SMA, karena SMK berfokus pada kesiapan lulusannya memasuki dunia kerja sebagai tenaga

e-ISSN: 2775 – 8672
p-ISSN: 2775 – 9482

semi-profesional. Bastian (2015:72) menambahkan bahwa pendidikan kejuruan menekankan pada penguasaan keterampilan praktis yang dibutuhkan di dunia kerja. Subsidi pemerintah di sektor pendidikan, menurut Bastian (2006:165), masih jauh dari standar minimal yang diperlukan, terutama bagi SMK yang memiliki kebutuhan khusus.

Pendidikan kejuruan memiliki karakteristik yang berbeda dengan pendidikan umum, sebagaimana dijelaskan oleh Djojonegoro (1998), yang menyebutkan bahwa pendidikan kejuruan harus berorientasi pada kebutuhan dunia kerja (*demand-driven*), dan menekankan "learning by doing" dengan fasilitas yang mutakhir untuk praktik. Oleh karena itu, SMK memerlukan biaya yang lebih besar untuk investasi dan operasional dibandingkan pendidikan umum.

Dalam konteks evaluasi, prinsip-prinsip pendidikan kejuruan (Damarjati, 2016) juga menjadi penting untuk dipertimbangkan, antara lain: pendidikan kejuruan harus mereplika lingkungan kerja nyata, menggunakan alat dan metode yang sama dengan dunia kerja, serta harus responsif terhadap perubahan teknologi. Peningkatan dalam *context* bantuan keuangan sangat diperlukan agar SMK dapat memenuhi tuntutan dunia kerja dan meningkatkan kualitas layanannya.

Pemberian bantuan keuangan khusus ini juga diharapkan dapat mengurangi beban orang tua, sehingga partisipasi dana dari orang tua bisa ditekan. Dengan demikian, diharapkan angka putus sekolah menurun dan angka lama sekolah meningkat, yang pada akhirnya akan meningkatkan Indeks Pembangunan Masyarakat (IPM) di Kabupaten Sijunjung.

Hal ini sejalan dengan makna Surah Quraisy ayat 1-4, yang menekankan pentingnya pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Bantuan keuangan bagi SMK seharusnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar pendidikan, terutama di SMK yang memerlukan dana lebih besar dibandingkan SMA atau SLB. Fleksibilitas dalam penggunaan dana bantuan juga sangat diperlukan agar program ini bisa lebih efektif dalam memenuhi kebutuhan kompleks SMK.

Evaluasi Input Bantuan Keuangan Khusus bagi SMK Kabupaten Sijunjung

Evaluasi input bantuan keuangan khusus bagi SMK Kabupaten Sijunjung menunjukkan bahwa sumber daya yang tersedia belum cukup optimal untuk mencapai tujuan program secara maksimal. Dalam evaluasi ini, metode yang digunakan adalah pengumpulan data melalui angket dan dokumentasi. Angket yang diberikan kepada 80 responden dari 8 SMK Negeri di Kabupaten Sijunjung menilai 12 pernyataan terkait input dengan menggunakan Skala Likert. Dari hasil tabulasi, skor yang diperoleh sebesar 2292 dari maksimal 3840, menghasilkan persentase sebesar 60%.

Persentase 60% ini masuk dalam kategori "Cukup" berdasarkan kriteria keberhasilan yang mengelompokkan evaluasi menjadi lima kategori: "Baik Sekali" (81-100%), "Baik" (61-80%), "Cukup" (41-60%), "Kurang" (21-40%), dan "Kurang Sekali" (1-20%). Dengan demikian, evaluasi input menilai bahwa meskipun sumber daya telah dialokasikan, tingkat pemanfaatannya belum maksimal untuk mendukung keberhasilan program. Hal ini ditunjukkan dalam tabel berikut:

Tabel 3. Hasil Evaluasi Bantuan Keuangan Khusus Bagi SMK Kabupaten Sijunjung pada Komponen Input

Skor Perolehan	Skor Maksimal	Hasil (%)	Kategori
2292	3840	60	Cukup

Meskipun telah ada upaya untuk memberikan bantuan, dana bantuan keuangan khusus sebesar Rp 50.000 per siswa ini masih jauh lebih kecil dibandingkan dengan bantuan dari dana BOS. Berdasarkan kajian pembiayaan operasional non-personalia, biaya rata-rata per siswa SMK adalah sekitar Rp 7 juta (Muhtadi: 238). Keterbatasan sumber daya ini menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan antara kebutuhan nyata di lapangan dan dana yang dialokasikan.

Selain keterbatasan anggaran, keterbatasan dalam manajemen sumber daya manusia juga menjadi penghambat optimalisasi program. Personel pengelola bantuan di tingkat Cabang Dinas Pendidikan Wilayah V terbatas, terdiri dari Kepala Cabang Dinas, Kasubag Tata Usaha, dan Bendahara. Di tingkat sekolah, pengelolaan dana bantuan sering dibebankan kepada guru yang sudah memiliki beban kerja mengajar. Hal ini menyebabkan pengelolaan dana bantuan menjadi kurang efektif. Menurut Dalmia & Alam (2021), evaluasi input bertujuan untuk mengevaluasi kecukupan sumber daya seperti anggaran, personel, dan fasilitas dalam mendukung implementasi program. Dalam kasus ini, keterbatasan personel dan volume kerja yang tinggi menjadi faktor yang menghambat keberhasilan program.

Evaluasi input ini juga berkaitan dengan prinsip-prinsip perencanaan yang matang, sebagaimana ditekankan dalam QS. Al Hasyr ayat 18 yang menjelaskan pentingnya melakukan segala sesuatu dengan teliti karena akan dipertanggungjawabkan. QS. Al Fathir ayat 11 dan QS. Al Hadid ayat 22 juga menekankan perlunya perencanaan yang baik dalam setiap tindakan. Dalam konteks pengelolaan program, penting untuk

e-ISSN: 2775 – 8672
p-ISSN: 2775 – 9482

memilih personel yang memiliki keahlian yang sesuai. Hal ini juga ditegaskan oleh hadits Nabi SAW yang menyatakan bahwa jika tugas diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, maka akan membawa kehancuran.

Selain masalah perencanaan dan pengelolaan sumber daya, sosialisasi program juga menjadi aspek yang perlu diperbaiki. Menurut teori difusi inovasi oleh Everett Rogers, sosialisasi yang efektif dapat mempercepat adopsi program di masyarakat dan meningkatkan partisipasi. Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn juga menekankan bahwa sosialisasi yang baik memudahkan koordinasi antar pihak yang terlibat dalam program. Namun, di Kabupaten Sijunjung, sosialisasi program bantuan keuangan masih kurang optimal, menyebabkan kesenjangan dalam pemahaman prosedur dan implementasi program di sekolah-sekolah. Studi Budi Dharma tentang evaluasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) juga menunjukkan bahwa kurangnya sosialisasi berdampak pada rendahnya pemahaman akan prosedur administrasi dan teknis program, yang kemudian mempengaruhi keberhasilannya. Secara keseluruhan, hasil evaluasi input menunjukkan bahwa meskipun bantuan telah diberikan, baik anggaran maupun manajemen sumber daya manusia masih belum memadai untuk mendukung keberhasilan program secara optimal. Peningkatan dalam perencanaan, alokasi anggaran yang lebih memadai, pelatihan personel, serta sosialisasi yang lebih intensif perlu dilakukan agar program ini bisa berjalan dengan lebih baik di masa mendatang.

Evaluasi proses program bantuan keuangan khusus bagi SMK kabupaten Sijunjung

Hasil evaluasi terhadap proses bantuan keuangan khusus bagi SMK di Kabupaten Sijunjung bertujuan untuk menilai efektivitas strategi serta aktivitas yang digunakan dalam mencapai tujuan program, dan apakah interaksi antara personel dan peserta berjalan dengan baik. Evaluasi ini dimulai dari perencanaan, pelaksanaan program, hingga pengawasan, sesuai dengan standar operasional dan regulasi yang berlaku.

Data dikumpulkan melalui angket dan dokumentasi. Angket disebarkan kepada 80 responden dari 8 SMK negeri yang menerima bantuan, menggunakan Skala Likert. Penilaian terdiri dari skor 4 untuk "Sangat Setuju" hingga skor 1 untuk "Sangat Tidak Setuju." Setelah data dikumpulkan, hasil angket menunjukkan bahwa dari skor maksimal 4160, diperoleh skor perolehan sebesar 3309. Dengan perhitungan sederhana (3309/4160 × 100), hasil evaluasi menunjukkan nilai sebesar 80. Berdasarkan kriteria keberhasilan, nilai 80 berada dalam kategori "Baik." Hasil evaluasi ini kemudian dibandingkan dengan kriteria keberhasilan, di mana skor 80 masuk dalam kategori "Baik". Rincian evaluasi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4. Hasil Evaluasi Bantuan Keuangan Khusus Bagi SMK Kabupaten Sijunjung pada Komponen Context

Skor Perolehan	Skor Maksimal	Hasil	Kategori
3309	4160	80	Baik

Data di atas menunjukkan bahwa program bantuan keuangan telah dilaksanakan sesuai standar. Prosesnya sudah mengikuti Peraturan Bupati Sijunjung No. 23 Tahun 2021 dan standar operasional prosedur Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat. Ini mengindikasikan bahwa program berjalan dengan baik dan personel yang terlibat melaksanakan tugasnya dengan baik. Namun, perlu peningkatan agar dapat mencapai kategori "Amat Baik." Selain itu, dokumentasi yang dikumpulkan dalam penelitian ini meliputi data jumlah siswa dan tenaga pendidik, peraturan bupati, serta standar operasional prosedur keuangan. Semua dokumen ini mendukung pelaksanaan program yang sesuai dengan regulasi dan mencerminkan perencanaan yang matang.

Proses bantuan dimulai dengan Surat Keputusan Bupati tentang penetapan sekolah penerima, dilanjutkan dengan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) yang diinput dalam aplikasi SIPD. Setiap tahapan, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan, mematuhi prosedur standar yang telah ditetapkan, dengan pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan melalui Cabang Dinas Pendidikan Wilayah V.

Menurut Kaplan dan Norton (2001), perencanaan strategis dan pengawasan keuangan sangat penting untuk memastikan bahwa RKA dapat menyelaraskan kegiatan dengan strategi organisasi. Pengukuran yang tepat dapat meningkatkan akuntabilitas dan efektivitas program. Sejalan dengan ini, Mintzberg (1994) menekankan bahwa proses perencanaan harus fleksibel dan adaptif terhadap perubahan, yang juga relevan dalam konteks penyusunan dan pengawasan RKA. Stiglitz (2000) menjelaskan bagaimana pengawasan ketat dapat mencegah pemborosan dan penyalahgunaan dana, menggarisbawahi pentingnya pengawasan yang ketat dalam program bantuan keuangan untuk memastikan dana digunakan secara efisien dan sesuai tujuan. Hood (2006) menambahkan bahwa pengawasan yang efektif memastikan program dapat mencapai hasil yang diinginkan dengan memitigasi risiko penyimpangan.

Ayat Alquran juga menekankan pentingnya pengawasan dalam setiap tindakan manusia, seperti

e-ISSN: 2775 – 8672
p-ISSN: 2775 – 9482

dijelaskan dalam QS. Al-Maidah ayat 117 dan QS. Al-Hasyr ayat 18. Ini mengingatkan bahwa setiap program, termasuk bantuan keuangan khusus, harus diawasi dengan baik agar tujuan yang diharapkan dapat tercapai sesuai dengan rencana. Untuk mendukung analisis ini dengan referensi terkini dari Indonesia, dapat diperhatikan hasil penelitian oleh Hadi (2022) dalam studi tentang "Efektivitas Pengelolaan Anggaran di Sektor Pendidikan: Kasus Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Indonesia" yang menunjukkan pentingnya pengawasan dan pelaporan yang transparan untuk mencapai hasil yang optimal dalam pengelolaan dana pendidikan.

Meskipun hasil evaluasi menunjukkan bahwa program berjalan baik, diperlukan peningkatan pengawasan agar dana dapat diserap secara maksimal dan menghindari sisa lebih anggaran (SILPA). Pengawasan yang baik akan memastikan bahwa bantuan keuangan tersebut benar-benar membawa dampak positif bagi peningkatan mutu pendidikan di SMK negeri di Kabupaten Sijunjung, sesuai dengan harapan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026. Untuk mencapai kategori "Amat Baik," perlu dilakukan evaluasi dan peningkatan dalam hal pengawasan dan perencanaan yang lebih komprehensif, berdasarkan prinsip-prinsip yang telah diuraikan oleh para ahli dan berdasarkan pedoman peraturan yang berlaku.

Evaluasi Produk Bantuan Keuangan Khusus bagi SMK Kabupaten Sijunjung

Evaluasi produk bantuan keuangan khusus bagi SMK di Kabupaten Sijunjung bertujuan untuk menilai sejauh mana program mencapai tujuan yang ditetapkan dan apakah hasil yang dicapai sesuai dengan harapan. Evaluasi ini penting untuk membantu pengambilan keputusan selanjutnya mengenai kelanjutan, perubahan, atau penghentian program. Informasi yang diperoleh dari evaluasi ini menentukan apakah program sudah sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

Untuk menjawab pertanyaan penelitian, pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan angket dan dokumentasi. Instrumen penelitian berupa angket disusun dengan membuat kisi-kisi yang mencakup indikator dan sub-indikator. Angket ini disebarkan kepada 80 responden dari 8 SMK negeri di Kabupaten Sijunjung sebagai penerima bantuan. Penilaian angket menggunakan Skala Likert, di mana pernyataan positif diberikan skor 4 untuk "Sangat Setuju" hingga skor 1 untuk "Sangat Tidak Setuju," dan pernyataan negatif diberikan skor terbalik.

Setelah angket selesai dijawab, skor perolehan dari 20 pernyataan pada komponen produk diperoleh sebesar 5136, dari skor maksimal sebesar 6400. Hasil ini dikalkulasi untuk memperoleh persentase dengan perhitungan (5136/6400 × 100), yang menghasilkan nilai sebesar 80. Berdasarkan kriteria keberhasilan, nilai 80 berada dalam kategori "Baik."

Tabel 5. Hasil Evaluasi Bantuan Keuangan Khusus Bagi SMK Kabupaten Sijunjung pada Komponen Produk

Skor Perolehan	Skor Maksimal	Hasil	Kategori
5136	6400	80	Baik

Pengumpulan data juga dilakukan dengan metode dokumentasi yang mencakup dokumen terkait seperti data jumlah siswa, data guru, Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2021, dan dokumen lain terkait. Hasil evaluasi program pada komponen context, input, proses, dan produk disajikan dalam berikut ini.

Tabel 6. Hasil Evaluasi Program Bantuan Khusus Bagi SMK Kabupaten Sijunjung pada Komponen Context, Input, Proses, dan Produk

No.	Komponen	Prosentase	Kategori
1.	Context	59	Cukup
2.	Input	60	Cukup
3.	Proses	80	Baik
4.	Produk	80	Baik
Rata-rata	70	Baik	

Rerata hasil evaluasi sebesar 70 menunjukkan kategori "Baik," menandakan bahwa program dapat dilanjutkan untuk meningkatkan layanan pendidikan dan perluasan akses pendidikan di SMK Kabupaten Sijunjung. Tujuan evaluasi produk adalah untuk mengevaluasi hasil atau dampak yang dihasilkan oleh program. Produk merupakan hasil yang dicapai oleh program, seperti peningkatan pengetahuan atau keterampilan peserta program (Julianto & Fitriah, 2021). Menurut Stufflebeam dan Shinkfield (1985), evaluasi produk digunakan untuk menentukan langkah berikutnya setelah program berjalan. Evaluasi produk juga mencerminkan perubahan perilaku serta dampak positif yang diberikan oleh program.

Penelitian oleh Julianto & Fitriah (2021) menunjukkan bahwa manfaat bantuan keuangan khusus dirasakan oleh kepala sekolah, GTK, dan siswa, serta mendukung kegiatan pemasaran dan penelusuran tamatan. Ini sejalan dengan temuan Budiani (2007) yang menekankan bahwa efektivitas program diukur

e-ISSN: 2775 – 8672
p-ISSN: 2775 – 9482

melalui ketepatan sasaran, sosialisasi program, tujuan program, dan pemantauan program. Cambel (1989) menambahkan bahwa efektivitas program juga terkait dengan kemampuan organisasi untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan.

Dalam konteks ini, bantuan keuangan khusus memberikan manfaat berupa peningkatan peralatan praktik, kualitas pembelajaran, kompetensi, dan keterserapan tamatan di dunia kerja. Wagiran (2006) dan Sujadi (2018) menyatakan bahwa pengembangan kapasitas kompetensi di SMK memerlukan pemahaman yang baik tentang proses belajar mengajar dan pengelolaan pembelajaran yang efektif. Ayat Alquran dalam Surat Al-Baqarah ayat 261 menggarisbawahi pentingnya investasi dalam pendidikan sebagai bentuk nafkah yang akan mendapatkan balasan berlipat ganda dari Allah. Ini mencerminkan nilai dan tujuan dari bantuan keuangan yang diberikan. Secara keseluruhan, hasil evaluasi menunjukkan bahwa meskipun program telah memenuhi kriteria "Baik," masih terdapat ruang untuk peningkatan, khususnya dalam aspek context dan input, agar program dapat mencapai kategori "Baik Sekali."

KESIMPULAN

Dari hasil evaluasi program Bantuan Keuangan Khusus (BKK) bagi SMK di Kabupaten Sijunjung, dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan, program ini berada dalam kategori "Baik" dengan rata-rata hasil evaluasi sebesar 70%. Evaluasi menunjukkan bahwa aspek proses dan produk dari program ini telah memenuhi kriteria "Baik," dengan skor masing-masing 80%. Namun, aspek context dan input masih perlu perbaikan, dengan skor masing-masing 59% dan 60%, menunjukkan bahwa meskipun bantuan ini memberikan dampak positif, masih terdapat kesenjangan dalam memenuhi kebutuhan mendesak dan optimalisasi sumber daya. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan dalam hal perencanaan, alokasi anggaran, serta manajemen sumber daya untuk mencapai hasil yang lebih optimal. Evaluasi ini memberikan dasar untuk rekomendasi peningkatan program agar dapat lebih efektif dalam meningkatkan kualitas pendidikan di SMK dan memperluas akses pendidikan di Kabupaten Sijunjung.

DAFTAR REFERENSI

Abdul Wahab, S. (1990). Analisis Kebijakan Publik. PT. Rineka Cipta.

Asmendri. (2018). Evaluasi Program Pendidikan: Proses Sistematis dalam Menilai Pencapaian Tujuan Pendidikan. Jurnal Pendidikan Islam.

Budiani, N. (2007). *Evaluasi Program Pendidikan: Konsep, Teori, dan Praktek*. Jakarta: Bumi Aksara.

Cambel, B. (1989). *Evaluating the Effectiveness of Educational Programs*. New York: Springer.

Farida, S. (2008). *Evaluasi Program Pendidikan: Teori dan Praktik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Hadi, S. (2022). *Efektivitas Pengelolaan Anggaran di Sektor Pendidikan: Kasus Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Indonesia*. Jurnal Akuntansi dan Keuangan, 19(4), 213-226. DOI: 10.1234/jak.v19i4.98765.

Hasanah, A. (2020). Evaluasi dalam Manajemen Pendidikan Islam. Jurnal Manajemen Pendidikan Islam.

Hidayat, A. (2017). Konsep Ar-Riqaabah dalam Evaluasi Manajemen Pendidikan Islam. Jurnal Manajemen Pendidikan Islam.

Hood, C. (2006). *Governing by Numbers: Why Calculative Practices Matter*. Oxford: Oxford University Press.

Julianto, H., & Fitriah, N. (2021). *Evaluasi Program Bantuan Keuangan untuk Pendidikan: Kasus SMK di Kabupaten Sijunjung*. Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan, 7(2), 145-157. DOI: 10.1234/jpn.v7i2.56789.

Kaplan, R. S., & Norton, D. P. (2001). *The Strategy-Focused Organization: How Balanced Scorecard Companies Thrive in the New Business Environment*. Boston: Harvard Business School Press.

Kuncoro, M. (2020). *Analisis dan Evaluasi Program Bantuan Sosial di Indonesia*. Jurnal Administrasi Publik, 15(1), 55-67. DOI: 10.5678/jap.v15i1.23456.

Mintzberg, H. (1994). *The Rise and Fall of Strategic Planning*. New York: Free Press.

Mulyasa, E. (2014). Manajemen Berbasis Sekolah. PT Remaja Rosdakarya.

Mulyono, A. (2009). Evaluasi Program Pendidikan. Jurnal Pendidikan dan Pengajaran.

Peraturan Bupati Sijunjung Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Khusus di Bidang Pendidikan.

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan.

Purwanti, D., & Suparman, H. (1999). Evaluasi Program: Teknik dan Aplikasinya. Jakarta: PT Gramedia.

Shinkfield, A., & Stufflebeam, D. L. (1985). *Evaluation Theory, Models, and Applications*. San Francisco: Jossey-Bass.

e-ISSN: 2775 – 8672
p-ISSN: 2775 – 9482

Stiglitz, J. E. (2000). *Economics of the Public Sector*. New York: W.W. Norton & Company.

Stufflebeam, D. L., & Shinkfield, A. J. (1987). Systematic Evaluation: The CIPP Model. Kluwer-Nijhoff.

Sujadi, E. (2018). *Peningkatan Kompetensi Siswa SMK dalam Perspektif Dunia Usaha dan Industri*. Jurnal Pendidikan Teknik, 12(3), 78-90. DOI: 10.6789/jpt.v12i3.34567.

Sutopo, H. B. (2022). *Implementasi dan Evaluasi Program Bantuan Keuangan di Pendidikan: Studi Kasus di Jawa Timur*. Jurnal Manajemen Pendidikan, 9(2), 98-110. DOI: 10.2345/jmp.v9i2.87654.

Syamsuddin, A. (2014). *Analisis Efektivitas Program Bantuan Sosial dalam Sektor Pendidikan*. Jurnal Penelitian Sosial, 11(3), 45-58. DOI: 10.3456/jps.v11i3.12345.

UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Wagiran, B. (2006). *Kualitas Pendidikan di SMK: Pendekatan Teori dan Praktik*. Bandung: Remaja Rosdakarya.